

POLA KOMUNIKASI ANTAR STRATA DALAM LEMBAGA SARA KIDINA DI BUTON, KOTA BAUBAU

Gunawan Rasyidi¹

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Makassar
Email: *gunawanrasyidi@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan; Untuk memahami pola komunikasi sesama strata di dalam Sara Kidina; Untuk memahami pola komunikasi antar strata di dalam Sara Kidina. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang terdiri dari pihak internal dan eksternal jabatan lembaga Sara Kidina. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua strata yang mengisi jabatan di lembaga Sara Kidina, yaitu strata kaomu yang menduduki jabatan sebagai Lakina Agama, Imamu, Khatibi, dan strata walaka yang menduduki jabatan sebagai Moji. Pada penelitian ini juga menemukan adanya upaya filtering didalam penyaluran informasi yang terjadi antar strata di lembaga Sara Kidina. filtering ini dilakukan oleh dua orang Moji yang mendapat peran tambahan di dalam Sara Kidina sebagai Tungguna Aaba. Tungguna Aaba-lah yang kemudian memiliki peran besar dalam menampung dan mengatur kapan segala informasi yang berkaitan dengan Sara Kidina harus disampaikan kepada seluruh pejabat Sara yang lain. Pola komunikasi yang terjadi baik sesama strata maupun antar strata memiliki kesamaan yakni sama-sama menggunakan pola komunikasi satu arah.

Kata Kunci: *Sara Kidina, Strata Sosial, Buton*

INTER-STRATA COMMUNICATION PATTERN IN SARA KIDINA INSTITUTION IN BUTON, BAUBAU CITY

ABSTRACT

This study aims; to understand the communication patterns of fellow strata in Sara Kidina; to understand the pattern of communication between strata within Sara Kidina; The approach used in this study is a qualitative approach. The research informants consisted of 7 people taken from inside and outside the institution's position in Sara Kidina. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study show that there are two strata that fill positions in the Sara Kidina institution, that is, a status strata that hold positions as Lakina Religion, Imamu, Khatibi, and Walaka strata who occupy positions as Moji. In this study also found the filtering function in distributing information that occurred between strata in the Sara Kidina institution. The filtering was carried out by two Moji people who received additional roles in Sara Kidina as Tungguna Aaba. It was Tungguna Aaba who later had a big role in accommodating and regulating when all information relating to Sara Kidina must be conveyed to all other Sara officials. Communication patterns that occur both among strata and between strata have in common that both use one-way communication patterns.

Keywords: *Sara Kidina, social strata, Buton*

Korespondensi: Gunawan Rasyidi, S.Sos., M.I.Kom. Universitas Hasanuddin Makassar. Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245. **No. HP, WhatsApp: 082292777388** Email: gunawanrasyidi@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagai suatu pemerintahan di masa lalu, Kesultanan Buton telah melewati banyak periode sejarah yang sedikit-banyak berpengaruh pada corak kebudayaannya. Mulai dari fase Kolonialisme, pasca kemerdekaan Indonesia, otoritarianism, reformasi, sampai pada fase demokrasi sekarang ini. Setiap periode atau fase sejarah tersebut setidaknya memiliki ciri dan memberi pengaruh pada cara hidup masyarakat Buton Misalnya saja pada fase Kolonialisme.

Namun ada sesuatu di kesultanan Buton yang tidak begitu terpengaruh oleh fase-fase tersebut di atas dan tetap terjaga nilainya sampai sekarang, Sara Kidina. Pejabat masjid Agung Keraton Buton atau lebih dikenal dengan Sara Kidina merupakan orang-orang yang bertugas sebagai pejabat Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton dan bersifat otonom karena diberi kuasa dan petunjuk dari Kesultanan dengan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, termasuk juga berfungsi sebagai lembaga peradilan agama islam di Buton. Salah satu yang unik dari Sara Kidina ini adalah setiap pemangku jabatan ditentukan berdasarkan strata yang melatarbelakangi anggota-anggotanya. Strata di Buton terdiri atas strata kaomu, walaka, dan papara.

Strata umumnya diartikan sebagai penggolongan masyarakat yang dilihat dari tingkat atau derajat masyarakat penganutnya. Tahara (2014:27) menjelaskan stratifikasi masyarakat

Buton yang dibangun sebagai ideologi kekuasaan terdiri atas tiga kelompok, Kaoumu, Walaka, dan Papara yang terbentuk sejak sultan Buton ke-4 Dayanu Ikhsanuddin. Kaomu dan Walaka merupakan kelompok masyarakat yang memiliki fungsi untuk saling mengawasi dalam sistem pemerintahan di Kesultanan Buton, dengan Kaomu sebagai Eksekutif dan Walaka sebagai Legislatif. Sementara pada Papara, masyarakat yang termasuk dalam kelompok ini dikenal sebagai kelompok pekerja dan tidak jarang menjadi budak dari kelompok Kaomu dan Walaka.

Dari strata-strata ini kemudian terbentuk pola komunikasi yang terjadi baik sesama maupun berbeda strata di dalam tubuh Sara Kidina. Pejabat Sara Kidina sendiri terdiri atas Lakina Agama, Imamu, Khatibi, dan Moji.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan rancangan penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Masjid Agung Keraton Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagai pendekatan kualitatif, penelitian ini menggambarkan suatu fenomena sosial. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset kualitatif tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Bila data yang terkumpul sudah bisa menjelaskan fenomena yang

diteliti maka pencarian sampling lainnya tidak diperlukan lagi sebab pada penelitian kualitatif yang ditekankan adalah persoalan kualitas data bukan kuantitas data. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan serta menjabarkan secara jelas seperti apa pola komunikasi baik sesama strata maupun antar strata yang terdapat pada Sara Kidina di masjid agung keraton Buton.

Untuk Jenis Penelitian dalam penelitian ini yakni Etnografi Komunikasi. Mengacu pada Koentjaraningrat (2008) seperti yang disebutkan dalam website pakarkomunikasi.com, etnografi komunikasi adalah kajian bahasa dalam perilaku komunikasi dan sosial dalam masyarakat (yang kemudian disebut masyarakat tutur), meliputi cara dan bagaimana bahasa digunakan dalam masyarakat dan budaya yang berbeda-beda. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua hal yang menjadi garis besar dalam kajian metode penelitian etnografi komunikasi, yaitu bahasa (linguistik) dan budaya (antropologi) (<https://pakarkomunikasi.com/etnografi-komunikasi>, diakses pada 15 maret 2018).

Informan

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan representatif. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sejumlah pejabat Sara Kidina. Selain itu, untuk memperkaya data peneliti juga akan menjadikan beberapa tokoh adat yang dianggap representatif sebagai informan. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan penelusuran budaya dan bentuk wawancara mendalam (indepth interview)

Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dan informasi diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Analisis Data

Cara analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles dan Huberman. Analisis data ini bertujuan mengatur urutan data, mengorganisasikan, dan mengkategorikannya. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data yang terkumpul kemudian mendeskripsikan guna mendapatkan gambaran jelas. Deskripsi data penelitian juga digunakan sebagai sarana melakukan pemberian makna atau intepetasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strata Masyarakat Buton (Kaomu, Walaka, Papara)

Pembagian masyarakat atau strata di Buton tidak ada pada zaman kerajaan. Strata tersebut justru lahir ketika Buton telah menganut sistem kesultanan yang tidak lain menandakan bahwa saat itu Raja dan mayoritas penduduk Buton telah memeluk agama Islam. Masuknya Islam di tanah Buton tidak hanya mempengaruhi gaya hidup masyarakat setempat melainkan juga merubah sistem pemerintahannya. Lakilaponto (Murhum) sebagai raja terakhir sekaligus sultan pertama Buton mengambil peran besar dalam perubahan tersebut. Lakilaponto menduduki tahtanya

menggantikan raja Mulae setelah berhasil memenangkan sayembara yang diadakan sendiri oleh Raja Mulae. Saat itu Raja Mulae merupakan raja kelima dan keamanan rakyat Buton sedang terusik akibat ulah kelompok bajak laut Tobelo yang dipimpin oleh La Bolontio. Kemudian Raja Mulae mengadakan sayembara yang hadiahnya tidak lain dan tidak bukan adalah posisi sebagai raja Buton menggantikan dirinya. Lakilaponto mengikuti sayembara itu dan memenangkan pertarungan melawan La Bolontio. Ia pun diangkat menjadi raja buton keenam.

Setelah menganut Islam, Lakilaponto menjadi penguasa pertama di Buton yang menyandang sebutan Sultan, tepatnya Sultan Qaimuddin yang kemudian setelah wafat dikenal sebagai Sultan Murhum.

Selain sebagai kepala pemerintahan, Murhum juga merupakan seorang ayah. Sultan Murhum memiliki tiga orang anak yang terdiri dari dua anak laki-laki dan seorang anak perempuan bernama Paramasuni. Kedua anak laki-laki itu masing-masing menjadi raja dan dilanjutkan oleh cucu mereka, La Singka dan La Bula. Ketiga orang anak Murhum tersebut kemudian dikenal sebagai kaboru-mboru talu miana dan menurunkan tiga golongan bangsawan yang disebut kaomu yang meliputi 1) tapi-tapi, yakni keturunan La Singka; 2) kumbewaha, yakni keturunan La Bula, dan tanailandu, yang merupakan keturunan Paramasuni (Zuhdi, 2018:61). Tahara (2014:91) menyebutkan bahwa pelapisan sosial kaomu, walaka, dan papara, mulai dikenal sejak masa pemerintahan Sultan Buton ke-4, yakni Sultan Dayanu Ikhsanuddin (1578-1615).

Hal ini diperkuat oleh Zuhdi (2018:69) yang mengatakan La Elangi atau Dayanu Ikhsanuddin bersama Sapati La Singka dan kenepulu La Bula membuat kesepakatan untuk membagi tiga jabatan tertinggi kesultanan kepada anak keturunan mereka masing-masing. Keturunan La Elangi membentuk cabang bangsawan kaomu tanailandu, keturunan La Singka, membentuk cabang keluarga kaomu tapi-tapi, dan keturunan La Bula membentuk cabang keluarga kaomu kumbewaha. Sultan dipilih dari salah satu keturunan tersebut. Perlu diketahui bahwa ada jabatan tinggi selain Sultan pada masa kesultanan Buton yakni jabatan Sapati dan jabatan Kenepulu. Sapati adalah jabatan sebagai perdana Menteri/wakil Sultan. Sapati bertugas memberikan penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang dikerjakan oleh sultan dan segala sesuatu yang datang dari sultan. Tugas Sapati pula untuk memberikan saran/pertimbangan apakah pekerjaan itu baik atau tidak (Tahara, 2014:106). Sedangkan Kenepula merupakan jabatan sebagai Menteri kehakiman. Ada beberapa tugas yang diemban sebagai seorang Kenepulu yakni memperlihatkan segala keluhan rakyat dan berperan sebagai pelindung Sultan. Baik Sultan, Sapati dan Kenepulu adalah jabatan-jabatan yang hanya boleh diduduki oleh golongan kaomu.

Untuk golongan yang kedua dikenal dengan nama Walaka. Walaka yaitu merupakan anak keturunan dari La Baalawulu dan Bulawambona (Zuhdi, 2018:61). Bulawambona sendiri merupakan raja kedua di kerajaan Buton yang tidak lain adalah Putri sulung dari 7 bersaudara, anak dari raja Wa Kaa Kaa, raja Buton yang

pertama. Disisi lain, Tahara (2014:93) mengatakan Walaka merupakan keturunan mia patamiana (empat orang pendatang) yang menurut tradisi lisan masyarakat Buton adalah para pendatang dari Melayu yang kemudian mendirikan Kerajaan Buton. Empat orang yang dimaksud yaitu yakni Sipanjonga, Simalui, Sitanamajo, dan Sijawangkati.

Golongan yang ketiga disebut papara, yaitu rakyat umum. Papara juga dikenal sebagai orang-orang yang mendiami suatu wilayah di Buton yang disebut kadie. Kadie sendiri adalah suatu wilayah tempat pemukiman warga dalam pemerintahan kesultanan Buton.

Begitu besar peran strata dalam pembagian kerja dan cara hidup masyarakat Buton pada masa kesultanan. Hal ini tentu saja berlaku dalam semua lembaga pemerintahan kesultanan, tidak terkecuali Sara Kidina.

Sara Kidina

Sara Kidina merupakan salah satu lembaga pada masa kesultanan Buton yang keberadaannya mendampingi kesultanan atau Sara Ogena dalam menjalankan roda pemerintahan. Bila Kesultanan atau Sara Ogena berfokus pada urusan-urusan di alam nyata maka Sara Kidina berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib seperti keyakinan, agama, dan adat. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa Sara Kidina adalah pemerintahan untuk urusan keagamaan. Hal ini tidak mengherankan mengingat Sara Kidina memang bagian dari kesultanan Buton, namun terpisah dari segi pekerjaan. Sehingga baik pekerjaan maupun cara mereka bekerja tidak akan mendapat intervensi dari pihak manapun termasuk

dari Sultan Buton. Berdasarkan wewenangnya, Sara Kidina juga bisa diartikan sebagai pemerintahan dalam pemerintahan, karena mereka mengurus urusan yang berbeda dengan urusan kesultanan namun disisi lain sangat berkaitan satu sama lain. Laode Mursal, Imam masjid Agung Keraton Buton menganalogikan hubungan antara kesultanan dengan Sara Kidina seperti tubuh manusia dengan roh yang ada didalamnya. Tubuh manusia sebagai kesultanan dan roh sebagai Sara Kidina. Tubuh tanpa roh maka hanya berupa tubuh, roh tanpa tubuh hanya berupa roh.

Istilah Sara sendiri memiliki makna yang beragam. Seperti apa yang dikatakan oleh Muchir (2003:83); (a) Sara itu bisa berarti Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar (Adat Istiadat), (b) Sara itu bisa berarti struktur atau organisasi pemerintahan dari atas sampai kebawah, baik hubungan hirargis maupun hubungan kerja, (c) Sara itu bisa juga berarti satu kesatuan, misalnya Sara wolio atau sara ogena ataupun sarana lipu, Sara Kidina yang umum disebut sebagai Sara Hukumu, Sarana Barata, dan Sarana Kadie.

Pembahasan mengenai suatu isu baik tentang keadaan masyarakat kota Baubau maupun tentang keadaan pejabat Sara Kidina sendiri dibahas di tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Tempat yang dimaksud yakni galampa. Galampa adalah sebutan untuk sebuah tempat yang memiliki daya tampung yang cukup untuk dijadikan tempat bermusyawarah. Bila musyawarah diadakan di rumah pejabat Lakina Agama, maka tempat musyawarah itu disebut galampana Lakina Agama atau secara harfiah berarti galampa-nya Lakina Agama, galampa milik Lakina Agama. Bila

musyawarah itu dilaksanakan di rumah Imamu maka disebut galampana Imamu atau galampanya imam atau galampa milik Imam.

Jabatan Dalam Sara Kidina

Jabatan pada Sara Kidina sangat berperan penting dalam pembagian tugas para pejabatnya. Secara umum salah satu tugas yang diemban oleh Sara Kidina adalah dengan ilmu agamanya diharapkan mampu membentengi atau melindungi negeri (pulau Buton) dari segala huru-hara yang datang baik dari dalam maupun dari luar Pulau Buton. Mengingat begitu penting dan kompleksnya tugas Sara Kidina maka sara Kidina memiliki pejabat-pejabat dengan kualifikasi yang sangat ketat dalam lembaganya. Pejabat-pejabat ini diangkat berdasarkan keturunan dan strata yang melekat pada dirinya. Pejabat-pejabat yang dimaksud yaitu:

Moji

Moji adalah jabatan yang diduduki oleh golongan walaka. Moji berjumlah 12 orang. Setiap Moji diberi gelar maa setelah ia resmi menjabat. Gelar ini bisa berdasarkan nama pribadi, nama anak ataupun nama cucu yang telah melekat pada dirinya. Misalnya, ketika pejabat Moji itu memiliki anak bernama Toni maka bila ia mau ia bisa bergelar maatoni.

Beberapa dari Moji mendapat tugas tambahan diataranya sebagai: Tungguna Aaba, yaitu juru bicara atau bisa diartikan sebagai humas dari sara kidina. Jumlah Moji yang menduduki jabatan ini dua orang, Tungguna Toba, yaitu Moji yang menjalankan fungsi-fungsi bendahara dan berjumlah dua orang. Tungguna Bula, yaitu Moji yang bertugas menjaga waktu dan terdiri atas dua

orang Moji. Merekalah yang menentukan kapan memasuki bulan Ramadhan, kapan merayakan Idul Fitri dan lain sebagainya. Sebagai pejabat Sara Kidina, para Moji juga memiliki tongkat yang selalu mereka bawa selama berkaitan dengan tugas-tugasnya. Tongkat ini memiliki kepala yang terbuat kuningan.



Gambar 4.4 *Katuko (tongkat jabatan) para Moji*

- *Khatibi*

Khatibi adalah jabatan yang diduduki oleh golongan *kaoumu*. *Khatibi* berjumlah 4 orang. Masing-masing *Khatibi* mendapat gelar berdasarkan pada tempat tinggal mereka. Ketika seorang *Khatibi* tinggal di daerah yang dikenal sebagai tanah abang, maka *Khatibi* yang bersangkutan bergelar *Khatibi Tana Aaba*. Ketika *Khatibi* tinggal di daerah wajo, maka *Khatibi* yang bersangkutan bergelar *Khatibi Wajo*. Namun bila telah diberhentikan sebagai *Khatibi* maka gelar tersebut ditambah menjadi *yarona Khatibi wajo* Sama seperti pejabat *Moji*, para pejabat *Khatibi* juga memiliki tongkat yang selalu mereka bawa selama berkaitan dengan tugas-tugasnya. Tongkat ini memiliki kepala berwarna perak dengan dilengkapi umbul-umbul yang warnanya berbeda satu sama lain. Untuk

warna umbul-umbul tongkat para *Khatibi* tidak memiliki makna, tujuannya hanya sebagai pembeda tongkat *Khatibi* yang satu dengan tongkat *Khatibi* yang lain.



Gambar 4.5 Katuko Lakina Agama (kiri), Imam (kiri kedua), para Khatibi

- *Imamu*

Imamu ibarat sultan Batin sehingga tidak heran bila ia memiliki wewenang khusus di dalam Masjid Agung Keraton Buton dan berasal dari golongan *kaomu*. *Imamu* tidak bisa diinterfensi oleh siapapun ketika hal tersebut menyangkut kebatinan, agama dan masjid. Tidak sama seperti *Moji* dan *Khatibi* yang mendapat gelar saat telah menduduki jabatan, *Imamu* mendapat gelar setelah tidak menjabat lagi. Penamaan gelar ini berdasarkan pada tempat ia tinggal. Bila *Imamu* yang telah turun dari jabatannya itu tinggal di daerah tanah abang, maka gelar *Imamu* itu *yarona Imamu tana aaba*. Kata *yarona* dalam tradisi lokal berarti mantan.



Gambar 4.6 Imamu saat memimpin dzikir

Untuk tongkat, *Imamu* memiliki satu tongkat dengan umbul-umbul harus berwarna hijau.

Warna hijau melambangkan agama Islam.

- *Lakina Agama*

- *Lakina Agama* merupakan jabatan yang diduduki oleh golongan *kaoumu*. Di zaman esultanan, *Lakina Agama* merupakan wakil Sultan di *Sara Kidina*. Sultan tidak bisa masuk ke dalam tubuh *Sara Kidina* sehingga mengutus wakilnya yaitu *Lakina Agama*. Kini, *Lakina Agama* bisa diartikan sebagai wakil pemerintah kota Baubau. Ia menjadi penghubung antara *Sara Kidina* dan pemerintah. Disisi lain *Lakina Agama* adalah pihak yang memiliki kuasa untuk memutuskan yang telah disepakati secara otonom oleh pejabat Masjid Agung Keraton Buton. Otonom berarti berwenang mengatur dan mengurus segala hal berkaitan dengan *Sara Kidina* tanpa interfensi dari pihak manapun. Dalam pemberian gelar, *Lakina Agama* sama seperti *Imamu* yang mendapatkan gelar setelah mereka meninggalkan jabatannya di *Sara Kidina*. Pemberian gelarpun juga berdasarkan pada dimana alamat *Lakina Agama* itu tinggal. Bila mantan *Lakina Agama* itu tinggal di daerah Betoambari maka *Lakina Agama* itu bergelar *Yarona agama Betoambari*. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kata *yarona* dalam bahasa Buton berarti mantan. Tongkat yang dimiliki seorang *Lakina Agama* memiliki umbul-umbul berwarna merah. Warna merah melambangkan ketegasan dan bijaksana.



Gambar 4.7 *Katuko Lakina Agama-Tungguna Ganda*, merupakan jabatan diluar jabatan *Sara Kidina* yang berjumlah 4 orang.

Dalam prakteknya, Tungguna Ganda diibaratkan sebagai kaki dan tangan dari Sara Kidina. Bila ada keperluan yang berkaitan dengan Sara Kidina seperti menyampaikan pesan atau menyampaikan undangan tertentu, maka Tungguna Ganda-lah yang melakukannya. Pejabat Sara Kidina tidak dibenarkan meminta Tungguna Ganda melakukan sesuatu diluar kepentingan masjid dan Sara Kidina.



Gambar 4.8 para Tungguna Ganda Disisi lain, Tungguna Ganda juga berperan sebagai panitia masjid yang bertanggung jawab pada kebersihan dan segala persiapan yang dibutuhkan ketika shalat di masjid Agung Keraton Buton

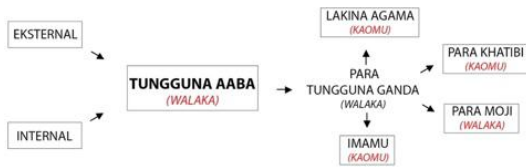
PEMBAHASAN

1. **Pola Komunikasi Sara Kidina 1.1 Penyebaran Informasi**

Penyebaran informasi yang terjadi dalam Sara Kidina tidak terjadi secara acak namun diatur oleh Tungguna Aaba. Tungguna Aaba bila dikaitkan dengan istilah sekarang dapat diartikan sebagai pejabat Humas yang mengatur segala informasi baik informasi yang masuk maupun informasi yang keluar. Dari Tungguna Aaba semua alur perintah berawal.

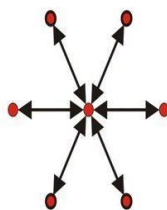
Perintah disini adalah seruan untuk menghadiri undangan (pokemba) dan atau seruan untuk menghadiri rapat (kapaliki) yang akan dihadiri oleh seluruh pejabat Sara Kidina. Misalnya, ada undangan dari pemerintah kota Baubau dengan agenda pemanjatan doa bersama. Undangan tersebut diterima oleh Lakina Agama. Lakina Agama tidak langsung menyampaikan undangan tersebut kepada seluruh pejabat Sara Kidina melainkan hanya berkomunikasi dengan Tungguna Aaba, melalui Tungguna Ganda. Disini, Tungguna Ganda hanya berperan sebagai perantara pesan antara Lakina Agama dengan Tungguna Aaba. Tungguna Ganda menyampaikan kepada Tungguna Aaba bahwa ada pesan dari Lakina Agama. Begitupun bila undangan itu didapat oleh Imamu atau pejabat Sara Kidina lainnya. Imamu tidak langsung menyampaikan ke yang lain melainkan disampaikan ke Tungguna Aaba melalui Tungguna Ganda. Semua pesan atau undangan yang mengatasnamakan Sara Kidina harus masuk dan diketahui oleh Tungguna Aaba. Dari Tungguna Aaba kemudian semua pesan atau undangan tersebut disebar ke seluruh pejabat Sara Kidina. Tentu Tungguna Aaba tidak menyebar semua pesan itu sendirian. Tungguna Aaba melalui Tungguna Ganda yang berjumlah empat orang mengkomunikasikan pesan atau undangan itu secara face to face atau tatap muka ke seluruh Moji, Khatibi dan lainnya. Seperti yang telah dikemukakan

sebelumnya bahwa Tungguna Ganda diibaratkan sebagai kaki dan tangan Sara Kidina. Dari mereka pesan disampaikan dan dari mereka juga pesan diterima.



Gambar 4.9 Alur Komunikasi Sara Kidina

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa selain sebagai humas dalam lembaga *Sara Kidina*, *Tungguna Aaba* juga berfungsi sebagai *filtering* yakni mengatur, menyaring dan memilih informasi yang akan disampaikan kepada pejabat *Sara* yang lain. Ini mirip seperti apa yang terdapat pada jaringan komunikasi dengan bentuk roda yang dikemukakan oleh sopiah (2008:144) yakni jaringan roda adalah jaringan komunikasi yang mengutarakan peran pemimpin sebagai pusat informasi dalam kelompok.



Gambar 4.10 Jaringan Roda

Hanya saja pada jaringan komunikasi bentuk roda oleh Sophia tersebut diatas mengutamakan peran seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Pemimpin memiliki peran besar dalam penerimaan dan penyebaran suatu informasi, sementara pada lembaga *Sara Kidina* satu-satunya yang memiliki kuasa penuh atas informasi baik informasi yang masuk maupun

keluar adalah *Tungguna Aaba*, yakni jabatan sebagai juru bicara yang diduduki oleh dua orang *Moji*. Ini membuat penyebaran informasi yang terjadi dalam lembaga *Sara Kidina* tergolong cepat dan memiliki ketepatan yang tinggi. Dalam penyebarannya pun *Tungguna Aaba* tidak menyebarkan sendiri, *Tungguna Aaba* dibantu oleh *Tungguna Ganda* yang terdiri atas empat orang yang membagi tugas dalam menemui para pejabat *Sara Kidina* secara face to face.

Berbeda halnya bila komunikasi itu terjadi di dalam konteks ritual atau ibadah yang dilakukan oleh *Sara Kidina*. Misalnya saja pada ibadah Shalat Jumat di Masjid Agung Keraton Buton. Komunikasi tidak dimulai dari *Tungguna Aaba*. Komunikasi terjadi berdasarkan waktu. Komunikasi pertama yang terjadi dalam ibadah shalat jumat yakni ketika pemimpin dari muadzin (orang yang mengumandangkan adzan) pertama yang merupakan seorang pejabat *Moji (Walaka)* melapor kepada Imam (*Kaoumu*) dengan mengeluarkan kalimat;

“*Jou imam, tokawao tombu, Kawamo waktu ta posanga bangu.*”

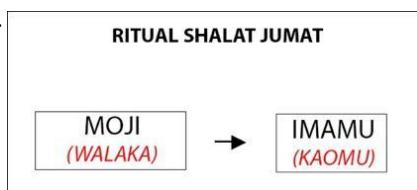
Kalimat tersebut diatas merupakan idiom yang memiliki arti “wahai imam, telah berkumpul anggota forum (pejabat *Sara Kidina*), telah tiba waktu untuk berdiri (mengumandangkan adzan)”. Untuk menanggapi laporan itu Imam tidak mengucapkan apa-apa sebab ketika imam telah masuk ke dalam Mihrabnya (tempat imam memimpin shalat), maka Imam tidak boleh lagi mengeluarkan kata-kata atau kalimat selain bacaan-bacaan shalat dan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga

yang bisa ia lakukan untuk menanggapi laporan dari muadzin oleh pejabat *Moji* tersebut adalah dengan bahasa nonverbal yakni menganggukkan kepala atau hanya dengan tatapan sebagai tanda bahwa ia mendengar dan menyetujui apa yang telah dilaporkan padanya.

Hal ini dilakukan sebab dalam pelaksanaan shalat Jumat ia diwajibkan berpuasa lisan atas segala ucapan yang dapat memungkinkannya mengeluarkan kata-kata yang tidak sewajarnya untuk diucapkan. Perlu diketahui, bila pada umumnya adzan dikumandangkan oleh satu orang maka pada waktu shalat Jumat di Masjid Keraton Buton orang yang mengumandangkan adzan (muadzin) terdiri atas empat orang dengan satu orang sebagai pemimpin adzan. Para muadzin ini merupakan pejabat-pejabat *Moji* yang secara bergantian bertugas disetiap minggunya.

1.2 Pola Komunikasi

Pola komunikasi yang terjadi dalam Sara Kidina memiliki perbedaan bila dilihat dari segi kapan komunikasi itu terjadi. Bila komunikasi itu terjadi dalam proses ritual seperti pada saat ritual shalat jumat maka pejabat yang melapor adalah *Moji* dan pejabat yang menerima laporan yakni Imam. Ini merupakan komunikasi yang terjadi antar strata dan pola komunikasinya berlangsung satu arah sebab ketika imam mendapat laporan dari pejabat *Moji*, Imam hanya bertindak sebagai komunikan.



Gambar 4.13 Pola Komunikasi antar strata (Moji dengan Imam)

Sedangkan pola komunikasi dalam konteks rapat yang dihadiri oleh seluruh pejabat Sara kita bisa melihatnya pada pembahasan subjudul pengambilan keputusan pejabat Sara, dan subjudul pemberhentian pejabat Sara Kidina. Dalam pembahasan berikutnya akan lebih detail dibahas bagaimana pola komunikasi yang terjadi baik sesama strata maupun antar strata.

SIMPULAN

Strata atau pembagian masyarakat di Buton khususnya dalam lembaga Sara Kidina merupakan pembagian yang ditujukan untuk membedakan pekerjaan kelompok kaomu dengan pekerjaan kelompok walaka. Kelompok kaomu tetap pada pekerjaan yang secara turun temurun diturunkan, dan kelompok walaka juga tetap pada pekerjaannya. Pada lembaga Sara Kidina, kelompok kaomu hanya menjalankan tugas-tugas yang diemban oleh jabatan sebagai Lakina Agama, Imam, dan Khatibi. Sedangkan kelompok walaka mengerjakan pekerjaan sebagai pejabat *Moji*. Untuk pola komunikasi yang terjadi di dalam Sara Kidina tidak bisa dilepaskan dengan konteks komunikasi itu terjadi. Dalam penelitian ini peneliti menfokuskan pada dua situasi yakni pola komunikasi yang terjadi pada saat ritual dan pada saat rapat. Dari kedua situasi tersebut ditemukan.

Pola Komunikasi yang terjadi untuk sesama strata merupakan pola komunikasi satu arah dimana komunikator hanya menyampaikan apa yang ingin disampaikan dan komunikannya hanya mendengar apa yang disampaikan komunikator. Ini bisa dilihat pada saat para pejabat Sara Kidina

melakukan musyawarah. Ketika Khatibi mengutarakan pendapatnya kepada Imamu dan Lakina Agama, Imamu dan Lakina Agama tidak melakukan timbal balik kepada Khatibi. Mereka cukup mendengar pernyataan dari Khatibi tersebut.

Pola komunikasi yang terjadi antar strata juga merupakan pola komunikasi satu arah dimana komunikator hanya menyampaikan apa yang ingin disampaikan dan komunikannya hanya mendengar apa yang disampaikan komunikator. Hal ini bisa dilihat ketika proses ritual shalat jumat dimana salah satu Moji (walaka) yang bertugas menyampaikan laporan kepada Imamu (kaomu) dan Imamu tersebut hanya berperan sebagai komunikan yakni menerima pesan atau laporan yang disampaikan kepadanya. Sedangkan pada saat rapat atau musyawarah, Moji juga hanya mengutarakan pendapatnya kepada Imamu dan Lakina Agama tanpa mendapat feedback langsung dari keduanya.

Dalam penyebaran informasi, lembaga Sara Kidina memiliki Tungguna Aaba, yakni sebuah jabatan sebagai juru bicara yang diduduki oleh dua orang Moji. Tungguna Aaba bertanggung jawab penuh atas segala informasi yang masuk di dalam Sara Kidina. Hal ini dilakukan sebab sejak dulu masyarakat Buton khususnya pejabat Sara meyakini bahwa harus ada pihak yang menjadi pintu masuk dan pintu keluar dari segala informasi yang ada dan yang menjaga pintu itu bukanlah seorang pemimpin lembaga melainkan orang yang berbeda dari pemimpin. Perbedaan yang dimaksud disini adalah berbeda dari segi strata. Bila pemimpin itu merupakan keturunan kaomu maka

yang menjaga pintu informasi tersebut diatas harus dari keturunan walaka. Sama halnya ketika berbicara tentang pemilihan Sultan Buton. Sultan Buton yang merupakan seorang kaomu tidak dipilih oleh orang-orang dari golongan kaomu juga melainkan dipilih oleh golongan walaka. Orang-orang dari golongan walaka-lah yang memilih, mengangkat dan memberhentikan seorang Sultan Buton. Informasi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam suatu lembaga khususnya pada lembaga Sara Kidina.

DAFTAR PUSTAKA

Book

- Berger, Charles R. dkk. 2014. *Handbook Ilmu Komunikasi*. Bandung: Nusa media.
- Cangara, Hafied. 2015. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Edisi Kedua. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Cangara, Hafied. 2016. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi*. Edisi Revisi 2016. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Djatmiko, Hayati Yayat. 2004. *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Keesing, Roger M. *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*. Terjemahan oleh R.G. Soekadiji. Jakarta: PT. Penerbit Erlangga
- Nurudin. 2011. *Pengantar komunikasi massa*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Muhammad, Arni. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Pranowo, B.M. dkk. 1988. *Stereotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*. Bandung: PT Pustaka Grafika Kita.
- Ridwan, Aang. 2016. *Komunikasi Antarbudaya: Mengubah Persepsi dan Sikap dalam Meningkatkan Kreativitas Manusia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saebani, Beni Ahmad. 2016. *Komunikasi Antarbudaya: Mengubah Persepsi dan Sikap dalam Meningkatkan Kreativitas Manusia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sobur, Alex. 2009. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tahara, Tasrifin. 2014. *Melawan Stereotip: Etnografi, Reproduksi Identitas, dan Dinamika Masyarakat Katobengke Buton yang Terabaikan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Zuhdi, Susanto. 2018. *Sejarah Buton Yang Terabaikan: Labu Rope, Labu Wana*. Jakarta Selatan: Wedatama Widya Sastra.

Jurnal Online

Handayani, Sri Wahyuni Ening. 2011. *Budaya Organisasi, Iklim Komunikasi Organisasi Dan Kinerja Karyawan: Studi Pengaruh Budaya Organisasi dan Iklim Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja karyawan Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta Tahun 2011*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Isnaini, Mohd. 2011. *Komunikasi Organisasi Di Perpustakaan Perguruan Tinggi: Studi kasus Pada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Perguruan Tinggi XY*. Depok: Universitas Indonesia

Kudus, Zuumi. 2014. *Peran Sara Kidi Pada Masyarakat Buton*. Kendari: Universitas Halu Oleo.

Mariana, Feni. 2017. *Upacara Adat Posuo Sebagai Media Komunikasi Pendidikan Informal Perempuan Wolio Di Kota Baubau*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Rismayanti, rebekka. 2016. *Corporate decision making dalam komunikasi organisasi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Sunani, Ulya. 2015. *Analisis Simbolik Perahu Sandeq Sebagai Ikon Daerah Dalam Hubungannya Dengan Kearifan Lokal Di Poliwali Mandar*. Makassar: Universitas Hasanuddin